

FACTORS AFFECTING THE CORRUPTION RATE OF INDONESIAN LOCAL GOVERNMENTS: LAW ENFORCEMENT AS A MODERATION VARIABLE

By Fani Marlina Nasution

Abstrack

This research is a quantitative study conducted to test and prove the relationship between the effect of fiscal decentralization, internal government audit and audit opinion on the level of corruption in the Indonesian Regional Government with law enforcement as a moderating variable. This research focuses on local governments, namely districts or cities in Indonesia in the 2020 observation period. The sample in this study is 93 data samples selected by the purposive sampling method with the criteria for district or city governments that have permanent legal corruption cases in 2020. Testing The hypothesis in this study uses Moderated Regression Analysis (MRA) with SPSS version 26 program. The results show that fiscal decentralization has a significant negative effect on the level of corruption, government internal audit has a significant positive effect on the level of corruption, audit opinion has no significant effect on the level of corruption. Law enforcement moderates the effect of government internal audit on corruption levels. Law enforcement does not moderate the effect of fiscal decentralization and audit opinion on the level of corruption.

Keywords: Corruption Level, Fiscal Decentralization, Government Internal Audit, Audit Opinion, Law Enforcement.

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KORUPSI
PEMERINTAH DAERAH INDONESIA: PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

Oleh Fani Marlina Nasution

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan guna menguji serta membuktikan hubungan pengaruh desentralisasi fiskal, audit internal pemerintah dan opini audit terhadap tingkat korupsi Pemerintah Daerah Indonesia dengan penegakan hukum sebagai variabel moderasi. Penelitian ini terfokus pada Pemerintah Daerah yaitu kabupaten atau kota di Indonesia pada periode pengamatan tahun 2020. Sampel pada penelitian ini yakni sebanyak 93 sampel data yang dipilih dengan metode purposive sampling dengan kriteria pemerintah kabupaten atau kota yang memiliki kasus korupsi berkekuatan hukum tetap tahun 2020. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan program SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat korupsi, audit internal pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat korupsi, opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi. Penegakan hukum memoderasi pengaruh audit internal pemerintah terhadap tingkat korupsi. Penegakan hukum tidak memoderasi pengaruh desentralisasi fiskal dan opini audit terhadap tingkat korupsi.

Kata Kunci: Tingkat Korupsi, Desentralisasi Fiskal, Audit Internal Pemerintah, Opini Audit, Penegakan Hukum.